



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/KHUSUS**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_KWN/2
Tanggal Pembuatan	:	1 Maret 2017
Tanggal Revisi	:	1 September 2021
Tanggal Pengesahan	:	6 September 2021
Disahkan Oleh		<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>
Nama SOP		<b>Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/Khusus</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
2. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 85);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No : 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Skep Kapolri No. Pol: SKEP/ 136/ I/ 2000 tanggal 31 Januari 2000 tentang tata laksana penertiban STNK Rahasia/ Khusus.
6. Surat telegram Kapolri Nomor: ST/113/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang penggunaan plat nomor randis
7. Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 11/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Polda Jawa Tengah dan Juklak Kapolda Jateng No. Pol: Juklak/ 12/ VIII/ 1990 tanggal 23 Agustus 1990.
8. Petunjuk Pelaksanaan No. Pol.: Juklak/ 07/ VIII/ 2003 tanggal 31 Agustus 2003 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor Polda Jawa Tengah.

**Kualifikasi Pelaksana**

- A. Kompetensi
  1. Memahami regulasi dan aturan tentang TNKB Rahasia/ Khusus.
  2. Memahami mekanisme dan tata cara Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus.
- B. Pendidikan
  1. Standar Pendidikan pelaksana S1.

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Peraturan Perundangan-undangan</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencermati persyaratan pengajuan TNKB Rahasia/ Khusus.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proposal ajuan dari instansi diinventarisir, dan diverifikasi .</li><li>2. Matrik Kajian, Matrik Verifikasi Administrasi.</li><li>3. Penerbitan Surat Rekomendasi TNKB Rahasia/ Khusus</li></ol>

**SOP : PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/KHUSUS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAKSANA	KASUBID	KABID	KABAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	SURAT PERMOHONAN MASUK					-KOMPUTER -SURAT PERMOHONAN -BERKAS SYARAT KELENGKAPAN -CEK LIST	1 Hari		
2	KAJIAN						2 Hari	Paraf	
3	REKOMENDASI						2 Hari	- Nota Dinas - Surat Rekomendasi	
4	PENGAMBILAN							Surat Rekomendasi Ditandatangani	

**URAIAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI TNKB RAHASIA/ KHUSUS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PELAKSANA	KASUBID	KABID	KABAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	SURAT PERMOHONAN MASUK	Disposisi	Disposisi	Disposisi	Disposisi	1.KOMPUTER 2.SURAT PERMOHONAN 3.BERKAS SYARAT KELENGKAPAN 4.CEK LIST	1 Hari	Disposi	
2	KAJIAN	cek kelengkapan persyaratan	Paraf	Paraf	Tanda Tangan	Tidak Lengkap	2 Hari	Surat Pemberitahuan ditolak/ dilengkapi persyaratannya.	
3	REKOMENDASI	Konsep Surat Rekomendasi	Paraf	Paraf	Tanda Tangan	Berkas memenuhi persyaratan	2 Hari	Surat Rekomendasi Ditandatangani	
4	PENGAMBILAN	Surat rekomendasi jadi						Surat Rekomendasi	

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**



*(Handwritten Signature)*

**HAERUDIN, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700729 199603 1 001